



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 304 /2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL PEMBANGUNAN BARU DAN
PENINGKATAN KUALITAS RUMAH PASCA BENCANA PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa bencana merupakan kejadian yang tidak terduga dan tidak diinginkan oleh semua orang;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah memberikan pelayanan dasar berupa penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana serta fasilitasi bagi masyarakat terkena program relokasi, maka perlu menetapkan Penerima Bantuan Sosial Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Pasca Bencana Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 786);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2019 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2019 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 25);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 43);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Sosial Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Pasca Bencana Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab untuk menggunakan bantuan sesuai peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana di Kabupaten Tabalong kode kegiatan 1.04.02.2.03 sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 20 Desember 2024

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 38A /2024
TANGGAL 20 Desember 2024

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL PEMBANGUNAN BARU DAN PENINGKATAN
KUALITAS RUMAH PASCA BENCANA PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1.	Arbayah	Desa Sei Anyar RT. 07, Kec. Banua Lawas	Pembangunan Baru
2.	Yusran	Desa Sei Anyar RT. 02, Kec. Banua Lawas	Pembangunan Baru
3.	Abdullah	Desa Sei Anyar RT. 03, Kec. Banua Lawas	Pembangunan Baru
4.	Akhmad Riduan	Desa Pamarangan Kanan RT 03, Kec. Tanta	Pembangunan Baru
5.	Ipah	Desa Pamarangan Kanan RT.03, Kec. Tanta	Pembangunan Baru
6.	Muhammad Syarbini	Komplek Pasar Lama RT 01, Desa Banua Lawas, Kec. Banua Lawas	Pembangunan Baru
7.	Amrin Puhan	Desa Banua Lawas RT.01, Kec. Banua Lawas	Pembangunan Baru
8.	Hasanuddin	Desa Banua Lawas RT.06, Kec. Banua Lawas	Pembangunan Baru
9.	Muhammad Yuliadi	Desa Banua Lawas RT.05, Kec. Banua Lawas	Pembangunan Baru
10.	Arpan	Desa Banua Lawas RT.05, Kec. Banua Lawas	Pembangunan Baru
11.	Juraidi	Desa Banua Lawas RT.06, Kec. Banua Lawas	Pembangunan Baru
12.	Tapri	Desa Banua Lawas RT.06, Kec. Banua Lawas	Pembangunan Baru
13.	Sahrudin	Kelurahan Sulingan RT.1, Kec. Murung Pudak	Pembangunan Baru
14.	Muhran	Desa Harus RT.02, Kec. Muara Harus	Pembangunan Baru
15.	M. Amin	Desa Manduin RT.3, Kec. Muara Harus	Pembangunan Baru
16.	Riyani	Desa Manduin RT.3, Kec. Muara Harus	Pembangunan Baru
17.	Jakfar	Desa Ampukung RT.09, Kec. Kelua	Pembangunan Baru
18.	Aisyah	Desa Ampukung RT 1, Kec. Kelua	Pembangunan Baru
19.	Bahrurahim	Desa Paliat RT.03, Kec. Kelua	Pembangunan Baru
20.	Mujeni	Desa Paliat RT.03, Kec. Kelua	Pembangunan Baru
21.	Sabran	Desa Pudak Setegal RT.05, Kec. Kelua	Pembangunan Baru
22.	Fajarudin	Desa Pudak Setegal RT.05, Kec. Kelua	Pembangunan Baru
23.	Aini	Kelurahan Pulau RT 02, Kec. Kelua	Pembangunan Baru
24.	Ahmad Saipullah	Kelurahan Pulau RT 02, Kec. Kelua	Pembangunan Baru
25.	Syarkawi	Kelurahan Pulau RT 02, Kec. Kelua	Pembangunan Baru
26.	Norhidayah	Kelurahan Pulau RT 01, Kec. Kelua	Pembangunan Baru
27.	Fatimah	Desa Pampanan RT.06, Kec. Pugaan	Pembangunan Baru
28.	Mahdi	Desa Banua Lawas RT.05, Kec. Banua Lawas	Pembangunan Baru
29.	Mumus	Desa Pudak Setegal RT.005, Kec. Kelua	Pembangunan Baru
30.	Muhammad Isra	Jl. H.Mahrawi RT.04 Desa Jangkung Kec. Tanjung	Pembangunan Baru

No.	Nama	Alamat	Keterangan
31.	Masrumi	Desa Pamarangan Kiwa RT.04, Kec. Tanjung	Pembangunan Baru
32.	Hartini	Desa Pamarangan Kiwa RT.05, Kec. Tanung	Pembangunan Baru
33.	Masdar	Desa Pamarangan Kanan RT.03, Kec. Tanta	Pembangunan Baru
34.	Fitriadi	Desa Pamarangan Kanan RT.03, Kec. Tanta	Pembangunan Baru
35.	Syaifuddin Fauzi	Jl. Kuranji RT.01, Kel. Sulingan, Kec. Tanjung	Pembangunan Baru
36.	Rusidah	Jl. Kuranji RT.01, Kel. Sulingan, Kec. Tanjung	Pembangunan Baru
37.	Abdul Wahid	Jl. Kuranji RT.01, Kel. Sulingan, Kec. Tanjung	Pembangunan Baru
38.	Nawiyah	Jl. Kuranji RT.01, Kel. Sulingan, Kec. Tanjung	Pembangunan Baru
39.	Yati	Desa Madang RT 02, Kec. Muara Harus	Peningkatan Kualitas
40.	Murdia	Desa Madang RT 02, Kec. Muara Harus	Peningkatan Kualitas
41.	Hariyadi	Desa Madang RT 02, Kec. Muara Harus	Peningkatan Kualitas
42.	Mulkan	Desa Madang RT 02, Kec. Muara Harus	Peningkatan Kualitas
43.	Sartiman	Desa Madang RT 02, Kec. Muara Harus	Peningkatan Kualitas
44.	Mastiah	Desa Madang RT 02, Kec. Muara Harus	Peningkatan Kualitas
45.	Ana	Desa Madang RT 02, Kec. Muara Harus	Peningkatan Kualitas
46.	Masrun	Desa Madang RT 03, Kec. Muara Harus	Peningkatan Kualitas
47.	Masnun	Desa Madang RT 04, Kec. Muara Harus	Peningkatan Kualitas
48.	Kaman	Desa Madang RT 04, Kec. Muara Harus	Peningkatan Kualitas
49.	Kiah	Desa Madang RT 04, Kec. Muara Harus	Peningkatan Kualitas
50.	Janah	Desa Madang RT 04, Kec. Muara Harus	Peningkatan Kualitas
51.	Hamdanah	Desa Madang RT 05, Kec. Muara Harus	Peningkatan Kualitas
52.	Gusti Sukran	Desa Madang RT 05, Kec. Muara Harus	Peningkatan Kualitas
53.	Jamalu Rahmi	Desa Madang RT 05, Kec. Muara Harus	Peningkatan Kualitas
54.	Aspul	Desa Madang RT 05, Kec. Muara Harus	Peningkatan Kualitas

Pj. BUPATI TABALONG,

HAMIDA MUNAWARAH